

SKRIPSI

**ANALISIS PENGENDALIAN KREDIT PADA LEMBAGA
PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT LAMBING,
DESA MEKAR BHUANA KABUPATEN BADUNG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : I WAYAN DODIK SUANDIKA
NIM : 2415664108**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS PENGENDALIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT LAMBING, DESA MEKAR BHUANA KABUPATEN BADUNG

**I WAYAN DODIK SUANDIKA
2415664108**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memegang peranan vital dalam perekonomian desa adat di Bali, namun menghadapi risiko kredit yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tindakan pengendalian kredit, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan menilai efektivitas pengelolaan kredit di LPD Desa Adat Lambing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan jajaran manajemen LPD, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, selanjutnya data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPD Desa Adat Lambing telah menerapkan tindakan pengendalian internal yang mencakup kelima komponen COSO, seperti penggunaan SOP dan analisis 5C yang konsisten. Kendala utama yang dihadapi meliputi faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasabah dan tantangan internal berupa asimetri informasi dalam menilai karakter peminjam. Meskipun demikian, efektivitas pengelolaan kredit menunjukkan peningkatan yang signifikan, dibuktikan dengan penurunan drastis pada jumlah kredit bermasalah selama periode 2020-2024. Disimpulkan bahwa implementasi pengendalian kredit yang konsisten dan adaptif menjadi faktor kunci keberhasilan LPD dalam memitigasi risiko dan meningkatkan efektivitas.

Kata Kunci: Pengendalian Kredit, Efektivitas Kredit, Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	1
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	48
A. Kajian Teori.....	48
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	51
C. Alur Pikir.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	59
C. Sumber Data.....	59
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	61
E. Keabsahan Data.....	62
F. Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Deskripsi hasil penelitian.....	64
B. Pembahasan.....	74
C. Keterbatasan Penelitian.....	79
BAB V PENUTUP.....	83
A. Simpulan.....	83
B. Implikasi.....	83
C. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	89
Lampiran 1 Surat Izin Mencari Data.....	89
Lampiran 2 Laporan Neraca (2020-2024).....	90
Lampiran 3 Formulir Persetujuan Partisipan.....	96
Lampiran 4 Hasil Wawancara Tertulis.....	99

**Lampiran 5 Standar Operasional Prosedur (SOP) LPD Desa Adat
Lambing Mekar Bhuana..... 112**



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perkembangan Kredit di LPD Lambing Desa Mekar Bhuana Periode tahun 2020-2024	71
Tabel 4. 2 Hasil Wawancara.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir54
------------------------	---------



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Mencari Data	89
Lampiran 2 Laporan Neraca (2020-2024)	90
Lampiran 3 Formulir Persetujuan Partisipan	96
Lampiran 4 Hasil Wawancara Tertulis	99
Lampiran 5 Standar Operasional Prosedur (SOP) LPD Desa Adat Lambing Mekar Bhuana.....	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu pilar utamanya. Dalam kerangka ini, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memegang peranan yang sangat strategis sebagai instrumen untuk meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat, khususnya mereka yang belum sepenuhnya terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Keberadaan LKM di Indonesia, yang landasan hukumnya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, bertujuan untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat agar menjadi lebih tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Di antara berbagai bentuk LKM yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, Provinsi Bali memiliki sebuah institusi keuangan yang unik, yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari tatanan kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakatnya, yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

LPD bukanlah sekadar lembaga keuangan mikro biasa; ia adalah manifestasi dari otonomi Desa Adat yang berakar pada filosofi luhur *Tri Hita Karana*, yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), manusia dengan sesama (*Pawongan*), dan manusia dengan alam lingkungan (*Palemahan*). Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, LPD merupakan badan usaha keuangan yang dimiliki secara kolektif oleh Desa Adat

dan berfungsi ganda. Secara ekonomi (*artha*), LPD berperan sebagai motor penggerak perekonomian desa dengan menghimpun dana dari *krama* (warga desa) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit produktif. Namun, secara sosio-kultural (*dharma*), LPD juga berfungsi sebagai pilar penyangga adat dan budaya. Keuntungan yang dihasilkan tidak hanya dinikmati sebagai profit semata, tetapi dialokasikan kembali untuk pembiayaan upacara *yadnya*, pembangunan dan pemeliharaan pura, serta peningkatan kesejahteraan *krama* secara kolektif. Dualisme fungsi ini menempatkan LPD pada posisi yang sangat vital; kesehatannya tidak hanya menentukan stabilitas ekonomi desa, tetapi juga kelangsungan dan kelestarian adat Bali itu sendiri.

Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, LPD dihadapkan pada tantangan fundamental yang sama dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu risiko kredit. Penyaluran dana kepada masyarakat selalu mengandung potensi kegagalan pengembalian, yang jika tidak dikelola dengan baik, akan berujung pada kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL). Tingkat NPL yang tinggi masih menjadi isu persisten bagi banyak LPD di Bali, terutama pasca guncangan ekonomi akibat pandemi yang sangat memengaruhi sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Badung. Dampak dari NPL yang tinggi bersifat destruktif dan berantai. Secara finansial, ia menggerus modal, mengurangi kapasitas LPD untuk menyalurkan kredit baru, dan mengancam likuiditas lembaga. Secara sosial, ia merusak kepercayaan (*trust*) yang menjadi landasan utama operasional LPD. Ketika *krama* kehilangan kepercayaan, mereka akan menarik simpanannya, yang dapat memicu krisis likuiditas dan

berujung pada kegagalan operasional. Kegagalan sebuah LPD akan menimbulkan dampak yang lebih luas, tidak hanya kerugian finansial bagi para penabung, tetapi juga terhambatnya pendanaan untuk kegiatan adat dan sosial di desa.

Menyadari risiko ini, Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa secara tegas mewajibkan LPD untuk beroperasi dengan "prinsip kehati-hatian" (*prudential principle*). Amanat ini kemudian dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017, yang mengatur berbagai aspek manajemen risiko, mulai dari kecukupan modal, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pembentukan Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu (CPRR), hingga sistem klasifikasi kualitas pinjaman. Untuk menjawab tantangan risiko kredit tersebut, implementasi sistem pengendalian internal yang kokoh menjadi sebuah keniscayaan. Kerangka kerja pengendalian internal yang diakui secara global, seperti yang dirumuskan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), menyediakan lima komponen yang saling terkait: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Dalam praktik perkreditan, salah satu instrumen utama dalam aktivitas pengendalian adalah analisis kelayakan kredit 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Analisis ini memungkinkan LPD untuk menilai kelayakan calon peminjam secara komprehensif. Namun, penerapan analisis 5C di LPD memiliki dimensi yang lebih dalam dibandingkan bank konvensional.

Character tidak hanya dinilai dari riwayat kredit formal, tetapi dari reputasi sosial di dalam *banjar* dan keaktifan dalam kegiatan adat (*ngayah*). *Capacity* tidak selalu bisa diukur dari slip gaji, melainkan dari observasi langsung terhadap aliran kas usaha informal. *Collateral* bisa lebih fleksibel, namun juga lebih kompleks dalam hal legalitas adat. Sementara *Condition* sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sektoral yang dominan di wilayah tersebut, seperti pariwisata di Kabupaten Badung. Kompleksitas inilah yang membuat efektivitas pengendalian internal di LPD menjadi sangat bervariasi.

Meskipun demikian, tinjauan terhadap literatur akademis menunjukkan adanya inkonsistensi hasil atau celah penelitian (*research gap*) mengenai pengaruh komponen pengendalian internal terhadap efektivitas pemberian kredit di LPD. Di satu sisi, penelitian oleh Saskarini (2018) dan Swari, dkk. (2021) menyimpulkan bahwa kelima komponen pengendalian internal COSO secara holistik berpengaruh signifikan. Namun, di sisi lain, penelitian Puspitaningsih (2018) di LPD Kabupaten Klungkung menemukan anomali, di mana aktivitas pengendalian justru tidak berpengaruh signifikan. Lebih lanjut, penelitian oleh Dewi dan Nuratama (2022) di LPD Kecamatan Abiansemal menemukan bahwa hanya tiga dari lima komponen yang berpengaruh. Ketidakkonsistenan temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengendalian internal bukanlah formula "satu ukuran untuk semua", melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual yang unik di setiap LPD, seperti gaya kepemimpinan *pamucuk* LPD, kekuatan *awig-awig* dan *pararem* desa adat, tingkat partisipasi *krama*, dan struktur ekonomi lokal.

Konteks inilah yang membuat LPD Desa Adat Lambing menjadi sebuah fenomena yang sangat relevan untuk diteliti. Berlokasi di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, sebuah wilayah yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pariwisata, LPD Lambing menghadapi tantangan eksternal yang luar biasa akibat pandemi COVID-19. Namun, di saat banyak lembaga keuangan lain berjuang dengan peningkatan kredit bermasalah, LPD Lambing justru menunjukkan tren perbaikan kinerja yang sangat signifikan. Data internal lembaga menunjukkan bahwa Rasio NPL berhasil ditekan secara drastis dari 17,19% pada tahun 2020 menjadi hanya 4,00% pada akhir tahun 2024. Kontras antara tantangan eksternal yang berat dengan keberhasilan internal yang nyata ini menjadi justifikasi utama penelitian ini, yaitu untuk menganalisis secara mendalam tindakan-tindakan pengendalian spesifik yang diimplementasikan oleh LPD Desa Adat Lambing dalam mencapai efektivitas pengelolaan kredit yang tinggi. Selain itu, perlu dianalisis lebih lanjut mengenai adanya faktor-faktor non-formal atau kearifan lokal yang mungkin berperan sebagai mekanisme kontrol, meskipun tidak teridentifikasi dalam kerangka standar.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan holistik bagaimana tindakan pengendalian kredit diimplementasikan, apa saja kendala yang melekat dalam prosesnya, dan bagaimana efektivitasnya dalam menjaga kualitas aset produktif di LPD Desa Adat Lambing. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi empiris untuk mengisi celah penelitian yang ada dan menawarkan wawasan praktis bagi pengelolaan LPD lainnya di Bali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tindakan pengendalian internal kredit dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pemberian kredit di LPD Desa Adat Lambing?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan kredit di LPD Desa Adat Lambing berdasarkan perkembangan kolektibilitas kreditnya?

C. Batasan Masalah.

Penelitian ini berfokus pada analisis tindakan pengendalian internal kredit di LPD Desa Adat Lambing, Desa Mekar Bhuana. Aspek yang dianalisis meliputi implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kredit, tindakan pengendalian yang dilaksanakan, serta analisis perkembangan kolektibilitas kredit sebagai indikator efektivitas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan tindakan-tindakan pengendalian internal kredit yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan efektivitas pemberian kredit di LPD Desa Adat Lambing.
- b. Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan kredit di LPD Desa Adat

Lambing melalui data perkembangan kolektibilitas kredit.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberi manfaat positif dan berguna bagi semua kalangan, adapun manfaat penelitian ini yaitu :

a. Manfaat Teoretis

Menambah wawasan dan memperkaya kajian akademis mengenai penerapan pengendalian internal pada lembaga keuangan mikro, khususnya LPD, dengan memberikan bukti empiris dari studi kasus yang mendalam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi LPD: Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan masukan konstruktif dan referensi berbasis data untuk mengevaluasi serta memperkuat sistem pengendalian kredit guna meminimalkan risiko dan meningkatkan kinerja keuangan.
- 2) Bagi Politeknik Negeri Bali: Menjadi bahan referensi dan informasi aktual mengenai praktik akuntansi dan manajemen di LPD, yang dapat memperkaya materi ajar dan diskusi akademis.
- 3) Bagi Mahasiswa: Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berfikir kritis bagi mahasiswa serta memberikan pemahaman mengenai peran tindakan pengendalian kredit pada LPD Desa Adat Lambing.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Tindakan pengendalian internal kredit di LPD Desa Adat Lambing dilaksanakan secara komprehensif melalui model hibrida yang memadukan kontrol formal (SOP, analisis 5C, kepatuhan regulasi), kontrol informal berbasis kearifan lokal (pengetahuan komunal, "agunan sosial"), dan manajemen adaptif (kebijakan restrukturisasi proaktif).
2. Efektivitas Pengelolaan: Efektivitas pengelolaan kredit menunjukkan tren perbaikan yang sangat signifikan. Hal ini dibuktikan secara kuantitatif dengan menurunnya Rasio NPL dari 17,19% pada tahun 2020 menjadi 4,00% pada tahun 2024, yang mengindikasikan keberhasilan strategi pengendalian yang diterapkan dalam menavigasi krisis dan pemulihan ekonomi.

B. Implikasi

Beberapa implikasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebagai kontribusi praktis dan teoretis sebagai berikut:

1. Implikasi Praktis

LPD diharapkan memperkuat pengelolaan kredit tidak hanya sebatas menyediakan dokumen perjanjian kredit atau pendukung lainnya, tetapi

sangat penting mengawasi pelaksanaannya dan komitmen unsur-unsur yang terlibat atas perjanjian kredit tersebut. Penerapan nilai-nilai Tri Hita Karana yang sudah berjalan di masing-masing LPD agar terus ditingkatkan dan divitalisasi agar menjadi budaya yang mampu menyadarkan kewajiban para pengelola atau pegawai, sehingga meminimalisir tindakan fraud maupun hal-hal yang bertentangan secara hukum selama bekerja di LPD.

2. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperkaya kajian mengenai Analisis Pengelolaan Kredit dengan berfokus pada pengendalian dan evaluasi, dengan pengelolaan faktor internal dan eksternal LPD. Adapun tujuannya menuju efektivitas yang lebih baik dengan mengendalikan risiko kredit secara konsisten dan berkelanjutan.

C. Saran

Berdasarkan simpulan, beberapa saran dapat menjadi rekomendasi kepada beberapa pihak sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

1. Bagi LPD

Diharapkan kepada LPD agar selalu melakukan analisa terhadap pengelolaan kreditnya, proses pemutusan kredit mengacu pada peraturan. Untuk prosedur tindakan pengendalian dan evaluasi harus dilaksanakan secara maksimal, sehingga mampu membantu upaya penyelesaian kredit bermasalah yang akhirnya dapat menurunkan risiko kredit LPD.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong Politeknik Negeri Bali untuk mengembangkan kajian yang lebih luas, mendalam, dan variatif dalam menanggapi fenomena serta permasalahan pengelolaan kredit yang dihadapi oleh LPD.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan atau *refrensi* untuk mengembangkan karya tulis yang lebih mendalam terkait Analisa pengendalian kredit.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Gadai Pada Pt . Pegadaian (Persero) Cabang Sukabumi. *JAMMI - Jurnal Akuntansi UMMI*, I(2), 25–35.
- B, N. S. (2020). Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Marisa. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 17(3), 501–508. <https://doi.org/10.37476/akmen.v17i3.1010>
- Dewi, N. P. P., & Nuratama, I. P. (2022). Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Efisiensi Penyaluran Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 96–109.
- Kasmir (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mastra, I. M. (2017). Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Karyawan serta Peranan Badan Pengawas Terhadap Efektifitas Struktur Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Bangli. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 1–19.
- Purwasih, D. (2019). Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Efisiensi Penyaluran Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Kabupaten Badung. *Jsam (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(1), 62–100.
- Ratna Sari, I. A. D., & Erna Trisnadewi, A. A. A. (2018). Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penyaluran Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 9(2), 40. <https://doi.org/10.22225/kr.9.2.475.40-49>
- Swari, D. M. W. P., Yogantara, K. K., & Negara, I. P. A. A. (2021). Pengaruh Komponen Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kabupaten Tabanan. *Journal Research of Accounting*, 2(2), 132–145.
- Ulfah, L., & Massora, A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pemberian Kredit di BPR Harapan Saudara. *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 93–109.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ardani, N., & Herawati, N. (n.d.). Pengaruh Penerapan Prinsip 5c Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kabupaten Gianyar. Vol : 12 No : 02 Tahun 2021, 547-557.

- Dewi, I., & Widhiyani, N. (n.d.). Pengaruh Unsur-Unsur Struktur Pengendalian Intern pada Non Performing Loan di Lembaga Perkreditan Desa Kota Denpasar. Vol.25.1.Oktober (2018), 406-433.
- Ida Ayu Gede Candra Saskarini. (2018). Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa.
- Luh Made Cahya Dwi Puspitaningsih. (2018). Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Klungkung. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Pemerintah Provinsi Bali (2017). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Pemerintah Provinsi Bali (2019) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.
- Peraturan Gubernur Bali (2017) Peraturan Gubenrur Bali Nomor 44 Tahun 2017, tentang Peraturan Pelaksanaan.
- Rumengan, F., Pelleng, F., & Walangitan, O. (n.d.). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Terhadap Tingkat Keberhasilan Kredit Pada Pt. Suzuki Finance Indonesia. Vol. 6 No. 1 Tahun 2018, 37-45.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). Sistem informasi akuntansi. *Jakarta: Salemba Empat*, 3(01).
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 edisi ke-9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sondang P. Siagian; . (2006). *Sistem informasi manajemen /*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono, D. P. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, D. P. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- The Influence of Internal Control Implementation and Managerial Performance on Financial Accountability Local Government in Indonesia. Kewo Cecilia Lelly 2017, International Journal of Economics and Financial Issues pp.293-297. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (2017).
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017, 44 Gubernur Bali (2017).
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). Sistem informasi akuntansi. *Jakarta: Salemba Empat*, 3(01).

Siagian, S. P. (2006). *Sistem informasi manajemen*.

